

PRIORITAS 4	PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TEMA PRIORITAS	<i>Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah</i>
PENANGGUNGJAWAB	Wakil Presiden
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM ; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1.	BANTUAN SOSIAL TERPADU: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidental atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012									
1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	70,3	84,4	94,5	100	842,4	Kemenkes
2	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8481	8608	8737	8868	9000	6.447,2	Kemenkes
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS	1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	80	85	90	95	24.782,7	Kemenkes

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
4	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesetaraan, dan kemandirian ber-KB	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) 2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	3,75	3,80	3,89	3,97	4,05	4.378,2	BKKBN
				11,9	12,2	12,5	12,8	13,1		
5	Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1. Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang menjadi peserta KB mandiri 2. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif 3. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	135,72	BKKBN
				34	34	34	34	34		
				3	3	3	3	3		
6	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.916.220	3.640.780	3.370.200	3.103.210	59.599,1*)	Kemendiknas
7	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan jender di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.395.100	1.346.020	1.275.840	1.195.700	31.512,2*)	Kemendiknas
8	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan	Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	501.898	614.396	714.653	800.000	6.530,6 *)	Kemendiknas

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota								
9	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	390.476	475.417	560.358	645.298	9.243,0 *)	Kemendiknas
10	Kegiatan Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya keluasaan dan pemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	67.000	67.000	69.000	70.000	5.211,3*)	Kemendiknas
11	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, dan MA	1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MI 2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MTs 3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MA	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	1.152,0 1.944,0 1.216,0	Kemen Agama
12	Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin	Jumlah beasiswa miskin penerima beasiswa PTA	59.538	59.538	59.538	59.538	59.538	788,5	Kemen Agama
13	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH);	Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH;	816 ribu RTSM	1.116 ribu RTSM	1.516 ribu RTSM	1.404 ribu RTSM	1.170 ribu RTSM	8.985,0	Kemensos
14	Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin	Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan	Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	17,5 juta					11.800,0	Kemenko Kesra/ Perum

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	(RASKIN)	jumlah yang memadai dalam 1 tahun								Bulog
15	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terwujudnya redistribusi tanah	Terlaksananya redistribusi tanah (bidang)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	912,70	BPN
16	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat	Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara	24.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	856,7	Kemnakertrans
			Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	231 Kab/Kota	360 Kab/Kota	360 Kab/Kota	360 Kab/Kota	360 Kab/Kota		
17	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	3.000	4.300	5.600	6.900	8.400	212,1	Kemnakertrans
			Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	100%	100%	100%	100%	100%		
2. PNPM MANDIRI: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung										
1	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500 desa di 1.094 kec.	7.482 desa di 805 kec.	4.968 desa di 460 kec.	552 desa di 460 kec.	482 desa di 460 kec.	5.980,0	Kemen PU

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	Kawasan/Lingkungan Permukiman									
2	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan)	1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM 2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan	4.791 kec 2 kab/9 kec.	4.940 kec	4.943 kec	4.946 kec	4.949 kec	48.781,3 39,8	Kemendagri
3	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	237 kecamatan (RISE) Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)	1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial 2. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman	237 3.900	237 2.450	237 1.237	237 1.237	237 1.226	1.188,0 3.198,0	Kemen PU
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan	210 kab/kota (SANIMAS)	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30 kab/kota system on-site	35 kab/kota system on-site	40 kab/kota system on-site	50 kab/kota system on-site	55 kab/kota system on-site	331,0	Kemen PU
5	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem	4.650 desa (PAMSIMAS)	Jumlah desa yang terfasilitasi	1.472	1.165	500	700	813	4.224,0	Kemen. PU

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	Penyediaan Air Minum									
6	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir, dan 1 unit BLU pembiayaan.	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i>						1.300,6	KKP
			1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit		
			2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota		
			3. Tenaga pendamping	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang		
			4. Kelompok Usaha Mikro	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha		
7	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	1. Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR) 2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	1,5 triliun 4 triliun 200 10.000	2 triliun 5 triliun 200 10.000	2 triliun 6 triliun 200 10.000	2 triliun 7 triliun 200 10.000	2,5 triliun 8 triliun 200 10.000	4.500,0	Kementan
8	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM	Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal	Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal	51 kab, 186 kec, 4.596 desa	80 kab **)	80 kab **)	80 kab **)	80 kab **)	2.491,1 **)	KPDT
9	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata	Jumlah desa wisata	200	450	550	450	350	406,0	Kemen Budpar

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
3. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011										
1	Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR	100%	100%	100%	100%	100%	10.000,0	Kemenkeu (Anggaran 99)
2	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan	60%	65%	70%	75%	80%	3,1	Menko Perekonomian
Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Permodalan										
3	Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.	1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	8,2	Kemeneg KUKM
			2. Terasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional	7 Prov	8 Prov	9 Prov	10 Prov	10 Prov	15,7	Kemeneg KUKM
			3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage	100	100	100	100	100	1,8	Kemeneg KUKM
			4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank	100	100	100	100	100	5,0	Kemeneg KUKM
			5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah	2	2	2	3	3	10,0	Kemeneg KUKM
4	Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan	Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan	Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.	100 KSP/KJKS	100 KSP/KJKS 1 LMVD	100 KSP/KJKS 1 LMVD	100 KSP/KJKS	100 KSP/KJKS	13,1	Kemeneg KUKM

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.	pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.		1 LMVD			1 LMVD	1 LMVD		
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.	Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.	100 LKM	100 LKM	100 LKM	100 LKM	100 LKM	2,5	Kemeneg KUKM
		2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).	1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.	-	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	4,0	Kemeneg KUKM
			2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat	1 200 org	1.200 org	1.200 Org	1.200 Org	1.200 Org	5,0	
			3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6,0	
			4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM	900 org	900 org	900 org	900 org	900 org	5,0	
Kelembagaan Koperasi										
6	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi	Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.	1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis.	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	2,5	Kemeneg KUKM
			2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	-	1750 org	1750 org	1750 org	1750 org	6,0	Kemeneg

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.							KUKM
4. TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK) di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran										
1	Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran	1. Jumlah kegiatan dan koordinasi kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan, kajian kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran					10 kegiatan	15,1	Kemeko Kesra
2	Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK	1. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi kelembagaan TKPK 2. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan					12 kegiatan	13,5	
3	Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Kawasan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan	1. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di bidang penguatan masyarakat dan kawasan					8 kegiatan	7,6	
4	Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi	1. Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di					5 kegiatan	17,1	

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan	bidang kelembagaan dan kemitraan 2. Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi sinkronisasi hasil kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan							
5	Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG	1. Jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit modal usaha 2. Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi pengembangan akses sumber pendanaan bagi usaha mikro 3. Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro 4. Persentase pelaksanaan rekomendasi pembentukan LPDA-PK dan DME sebagai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro					8 kegiatan	7,1	

Catatan:

1. *) merupakan angka program, bukan angka kegiatan
2. **) masih merupakan usulan dari kegiatan P2DTK Fase II